

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Sanusi, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta.
- Adi Sujatno, 2009, *Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Pemerintahan Yang Baik (Good Government)*, Team 4 AS, Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anton M. Moeliono, dkk., 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bachrul Emi, 2002, *Keuangan Pemerintahan Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press.
- Bagir Manan, 1999, *Penelitian di Bidang Hukum*, Dalam Jurnal Hukum Puslitbangkum, Nomor Perdana : 1-4. Lembaga Penelitian di Bidang Pengembangan Hukum UNPAD, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bryant, Coralie & White Louise G., 1982, *Managing Development in the Third World*, Westview Press, Boulder, Colorado.
- Budi Sudjijono dan Dedy Rudianto, 2003, *Manajemen Pemerintahan Federal, Perspektif Indonesia Masa Depan*, Citra Mandala Pratama, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Cetakan I, Bandung.
- Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, 1981, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Inu Kencana Syafei, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juanda H., 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni Bandung.
- Josef Riwu Kaho, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik, Bunga Rampai*, Gramedia, Jakarta.
- La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Risda Karya, Bandung.
- Mardiasmi, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan*, ANDI, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jogjakarta.
- Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Michles, Robert, 1984, *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*, Jakarta : CV Rajawali.
- Milles Mattew dan A. Michael Huberman, 1982, *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohini, UI-Press, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 1967, *Kearah Indonesia Merdeka (1932), dalam Kumpulan Karangan Jilid I*, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH-UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung.

M. Soesilo, SH, 2009, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Disusun oleh : Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P. SH, Gama Press, Cek. I.
M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I dan II Tinjauan Hukum Terhadap Kerangka dan Isi UUD 1945 Dokumentasi Tahun 1959*.

Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.

Robert A. Dahl dikutip HS. Tisnanta, 2005, *Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* dalam Muladi : Editor, *HAM, Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetric*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Singgih D. Gunarsa, 1990, *Psikologi Perkembangan*, Gunung Mulia, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti dalam Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Editor Radian Salman, dkk., 2008, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Siti Sundari Rangkuti*, Airlangga University Press, Surabaya.

Smith, dalam Khairul Muluk, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia, Publishing, Malang.

Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU*, Penerbit UMM, Malang.

Syahrani Basah, 1992, *Ilmu Negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, PT. Cipta Adya Bhakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

———, 1986, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

———, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekarwo, 2005, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jogjakarta.
- Sudono Syueb, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2013, *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Cet. Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sunaryati Hartono, 1986, *Kembali Ke Penelitian Hukum*, Kertas Kerja Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Suwidi Tono, 2003, *Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta*, Vision 03 Jakarta, Jakarta.
- S. Prayudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Winardi, 1998, *Dasar-dasar Manajemen*, Alumni, Bandung.
- W. Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Fifth Edition, New York.
- Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundangan-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 Tentang *Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan

C. Makalah, Tesis, Ceramah Kuliah, Majalah, dan Jurnal

Bagir Manan, 2000, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000.

———, 2005, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun Ke-XX, No. 241, November 2005.

I Nengah Suriata, 2011, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Demokrasi*, Tesis, Denpasar, Universitas Udaya.

Jimly Asshiddiqie, 2002, *Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Pluralisme Hukum di Indonesia*, Ceramah Kuliah Perdana, Magister Ilmu Hukum UNSOED, Purwokerto.

Kemilau Mutik, 2010, *Kedudukan Naskah Akademik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah*, Tesis, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Solikhun, 2004, *Aspek Hukum Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999*, Tesis, Purwokerto, UNSOED.

Yusuf Sakir, 2009, *Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.10 No.1 April.

Tomy M. Saragih, 2011, *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.

D. Situs Internet

Karya Ilmiah. 2009. *Peran dan Fungsi DPRD Kota Surabaya Dalam Menyerap Aspirasi dalam Membangun Partisipasi Masyarakat*. www.blogspot.com. (Diakses tanggal 11 November 2013, pukul 15.11 WIB).

[http://edukasi.kompasiana.com/2012/07/22/peran-dan-hak-pengawasa masyarakat-479704.html](http://edukasi.kompasiana.com/2012/07/22/peran-dan-hak-pengawasa-masyarakat-479704.html) (Diakses tanggal 03 Desember 2013, pukul 16.11 WIB).

<http://www.google.com/imgres?imgurl=http://m3sultra.files.wordpress.com//2008/01/peta-administrasi-sulawesi-tenggarajpg&imgrefurl=http://m3sultra.wordpress.com>. (Diakses tanggal 11 November 2013, pukul 15.11 WIB).

[http://fadlimohnoch.blogspot.com/2011/02/catatan-singkat-peranserta masyarakat.html](http://fadlimohnoch.blogspot.com/2011/02/catatan-singkat-peranserta-masyarakat.html). (Diakses tanggal 11 November 2013, pukul 15.11 WIB).